

**KEBIJAKAN PUBLIK PENERBITAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH PEJABAT TATA
USAHA NEGARA BERDASARKAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 394
K/TUN/LH/2017.**

SKRIPSI

**OLEH :
DIAN AGUSTIAN LINGGA
201410115063**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KEBIJAKAN PUBLIK PENERBITAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH PEJABAT
TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 394
K/TUN/LH/2017.

Nama : Dian Agustian Lingga

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115063

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Nina Zainab, SH., MH.
NIP. 011606055

Pembimbing II

Melanie Pita Lestari, SS., MH.
NIP. 011611057

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : KEBIJAKAN PUBLIK PENERBITAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH PEJABAT
TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 394
K/TUN/LH/2017.

Nama : Dian Agustian Lingga

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115063

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Nina Zainab, SH., MH.
NIP. 011606055

Melanie Pita Lestari, SS., MH.
NIP. 011611057

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kebijakan Publik Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Studi Kasus Putusan Nomor 394K/TUN/LH/2017.

Nama : Dian AgustianLingga

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115063

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Ujian Skripsi : 4 Februari 2019

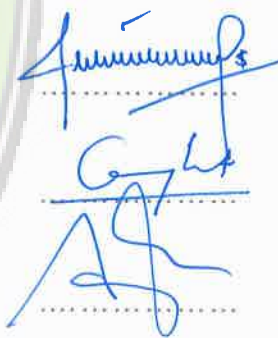
Bekasi, 7 Februari 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH.
NIP. 010403011

Penguji I : Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si.
NIP. 1712304

Penguji II : Sugeng, SH., MH.
NIP. 011611058



MENGETAHUI

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum**



Anggreany Haryani Putri, SH., MH.
NIP. 1712307

**Dekan
Fakultas Hukum**



Bhatara Ibnu Reza, SH., M.Si., LL.M., Ph.D.
NIP. 1809353

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“Kebijakan Publik Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Studi Kasus Putusan Nomor 394 K/TUN/LH/2017”.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 7 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Dian Agustian Lingga
201410115063

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Agustian Lingga
NPM : 201410115063
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non- Exclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KEBIJAKAN PUBLIK PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 394 K/TUN/LH/2017”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pankalan data (data base), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu untuk meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Bekasi

Pada tanggal : 7 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



DIAN AGUSTIAN LINGGA

ABSTRAK

Dian Agustian Lingga, 201410115063. Skripsi “**Kebijakan Publik Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Studi Kasus Putusan Nomor 394 K/TUN/LH/2017**”. Penelitian ini bertujuan meninjau kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan kebijakan publik yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum pemerintahan yang Baik (AUPB).

Sumber bahan hukum penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/LH/2017. Dalam perkara tersebut tergugat Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut melawan penggugat masyarakat dengan obyek sengketa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/946/103-IMB/BPMPT Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas pembangunan Pasar Limbangan.. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinilai masyarakat sekitar bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan masyarakat mengalami dampak buruk dari kegiatan pembangunan tersebut, namun pada tingkat Kasasi Majelis Hakim beranggapan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan karena surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut dikeluarkan setelah kegiatan pembangunan dimulai, serta melanggar asas kepentingan publik, asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas permainan yang layak. Pada pengadilan tingkat Kasasi, Majelis Hakim telah keliru memutus perkara *a-quo* serta kurang menggali fakta-fakta dalam merumuskan putusannya.

Kata Kunci :

Kebijakan Publik, Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Pejabat Tata Usaha Negara.

ABSTRACT

Dian Agustian Lingga, 201410115063. Thesis "Public Policy Issuance of Building Construction Permits by State Administration Officers Based on Legislation Provisions and Good Governance General Principles Case Study Decision Number 394 K /TUN/LH/2017". This study aims to review the authority of State Administration Officers in issuing public policies in the form of State Administrative Decisions based on statutory provisions and Good Governance General Principles (AUPB).

The source of legal material for this research is the decision of the Supreme Court Number 394 K/TUN/LH/2017. In the case the Garut District Government defendant through the Integrated Investment and Licensing Agency (BPMPT) of Garut Regency opposed the community advocates with the object of the dispute of Building Construction Permit Number 503/946/103-IMB/BPMPT concerning Building Construction Permits for the construction of the Limbangan Market. The State Administration is considered by the surrounding community to be contrary to the provisions of the Law and the General Principles of Good Government, and the community experiences the adverse effects of the development activities, but at the level of the Cassation the Judges assume that this is in accordance with the provisions of the Law apply.

To answer the above problems, this study uses a normative juridical method with a Legislative approach and a conceptual approach. The results of the study found that the object of the dispute was contrary to the provisions of the Law because the Building Construction Permit was issued after the construction activities began, and violated the principle of public interest, the principle of legal certainty, the principle of accuracy, and the principle of proper play. In the court of cassation, the Panel of Judges had wrongly decided the a-quo case and had not explored the facts in formulating the decision.

Keywords :

Public Policy, Issuance of Building Construction Permits, State Administration Officers.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta Ayahanda Ismail Lingga (Alm), Ibunda Rosmiyanti Marbun (Almh), Istri tercinta Nungki Setiowati, Amd. Kep., serta anak penulis yang tersayang Ibrahim Al Fadillah Lingga.

Selama dalam proses penulisan skripsi ini, tidak sedikit kendala yang dihadapi oleh penulis karena keterbatasan kemampuan penulis sendiri, namun berkat bantuan dari berbagai pihak khususnya dosen pembimbing Ibu Nina Zainab, SH., MH., dan Ibu Melanie Pita Lestari, SS., MH., yang selalu sabar dan tanpa lelah membimbing penulis, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih terdapat sejumlah kekurangan di dalamnya.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Bambang Karsono, Drs., S.H., M.M., Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bhatara Ibnu Reza, S.H. M.Si., LL.M.,Ph.D. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bahayangkara Jakarta Raya.
4. Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H. Ketua Penguji, Dr. Amalia Syauket, S.H., M.si. Penguji I, dan Sugeng, S.H., M.H. Penguji II, yang telah memberikan bimbingan, ilmu,dan sarannya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan kemudahan bagi penulis dalam menulis skripsi ini.
6. Ega Viesta Al Qabidin dan Holifatun sahabat yang seperti keluarga sendiri, yang selalu memberi motivasi serta membantu baik secara materi maupun imateril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman sekelas di kelas RSKM yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
8. Mario, Vega, Ipan, Meyer, Eunike, Zegestyn, Arvik teman seperjuangan sebagai pejuang skripsi yang selalu berbagi cerita suka dan duka dalam menulis skripsi.
9. Teman-teman di lingkungan yang selalu percaya akan kapabilitas saya untuk memimpin organisasi kepemudaan Bowo, Rama, Agung, Bustaman, Agung, Frans, Anton, Brehma, Ajat, Akmal, Gatot, dan yang saya tidak bisa sebutkan lainnya.
10. Pihak-pihak yang membantu memudahkan penulis baik secara materil maupun imateril dalam menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada pembaca terlebih kepada penulis sendiri.

Bekasi, 7 Februari 2019
Penulis



Dian Agustian Lingga

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIK	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Teoritis	7
1.4.1.1 Teori Negara Hukum (<i>Grand Theory</i>)	8
1.4.1.2 Teori Administrasi Negara (<i>Middle Range Theory</i>)	8
1.4.1.3 Teori Kewenangan Pemerintah (<i>Apply Theory</i>)	9
1.4.2 Kerangka Konseptual	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.5.1 Teknik Pengumpulan Data	13

1.5.2	Teknik Analisis Data	13
1.5.3	Tehnik Pengumpulan Data	15
1.5.4	Metode Analisis Data	15
1.6	Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		17
2.1	Tinjauan Umum Negara Hukum	17
2.1.1	Pengertian Negara Hukum.....	17
2.1.2	Unsur-Unsur Negara Hukum.....	18
2.1.3	Indonesia Sebagai Negara Hukum.....	19
2.2	Tinjauan Umum Tindakan Pemerintah.....	20
2.2.1	Pengertian Tindakan Pemerintah.....	20
2.2.2	Unsur Tindakan Hukum Kewenangan Pemerintah.....	21
2.3	Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pemerintah.....	22
2.3.1	Pengertian Kewenangan Pemerintah	22
2.3.2	Sifat Kewenangan.....	23
2.4	Tinjauan Umum tentang Pejabat Tata Usaha Negara.....	24
2.4.1	Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Alat Pemerintah	24
2.4.2	Sumber Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara	25
2.5	Tinjauan Umum tentang Keputusan Tata Usaha Negara	26
2.5.1	Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara	26
2.5.2	Syarat-Syarat Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara	27
2.6	Tinjauan Umum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	28
2.6.1	Pengertian Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	28
2.6.2	Pengelompokan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	29
2.6.3	Manfaat dan Arti Penting Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	36
2.7	Tinjauan Umum tentang Peradilan Tata Usaha Negara	38
2.7.1	Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara	39
2.7.2	Kompetensi Relatif Peradilan Tata Usaha Negara.....	41
2.7.3	Asas-Asas Khusus Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	42
2.8	Tinjauan Tentang izin Memberikan Bangunan (IMB)	43
2.8.1	Pengertian IMB.....	43

2.8.2 Kebijakan dan Prosedur Pemerintah Dalam Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan.....	44
2.8.3 Tujuan dan Fungsi Izin Mendirikan Bangunan	45
BAB III HASIL PENELITIAN	47
3.1 Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 394 K/TUN/LH/2017	47
3.1.1 Kasus Posisi	47
3.1.2 Para Pihak	48
3.1.3 Obyek Sengketa	49
3.1.4 Tenggang Waktu Gugatan	49
3.1.5 Alasan Kasasi	50
3.1.6 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	54
3.1.7 Amar Putusan	56
3.2.1 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung Nomor 76/G/LH/2016/PTUN-BDG.....	57
3.2.1.1 Posita Gugatan	57
3.2.1.2 Petitum.....	58
3.2.1.3 Amar Putusan	59
3.2.2 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/B/LH/2017/PT.TUN.JKT	61
3.2.2.1 Kasus Posisi	61
3.2.2.2 Alasan-alasan Permohonan Banding.....	61
3.2.2.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	61
3.2.2.4 Amar Putusan.....	64
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	65
4.1 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 394 K/TUN/LH/2017.....	65
4.2 Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/946/103-IMB/BPMT/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).....	75
4.2.1 Keputusan Tata Usaha Negara Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/946/103-IMB/BMPT/2016 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan.	75

4.2.2. Keputusan Tata Usaha Negara Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/946/103-IMB/BMPT/2016 Tidak Sesuai Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.	83
BAB V PENUTUP	87
5.1 Simpulan.....	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	



MOTTO

“Save The Best for The Last”

KUTIPAN FAVORIT

“Bebek berjalan berbondong-bondong akan tetapi elang tetap terbang sendiri” – Ir. Soekarno



DAFTAR SINGKATAN

UUD	Undang-Undang Dasar
KTUN	Keputusan Tata Usaha Negara
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PTTUN	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
TUN	Tata Usaha Negara
AUPB	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
IMB	Izin Mendirikan Bangunan

